

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Juni 2022/Khusus - Awal Menjabat)**

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZUHRI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 158109

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.750.000.000

1. Tanah Seluas 30000 m2 di NEGARA [unknown], WARISAN Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, WARISAN Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 302 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
6. Tanah Seluas 112 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
7. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
8. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 109.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA C1C02N16M2 A/T/ SPD MOTOR SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000



3. MOBIL, HONDA BRIO SATYA DD1 1.2 E MT CKD/ MINIBUS
Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	90.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	79.181.053
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.028.681.053
III. HUTANG	Rp.	75.633.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.953.048.053

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.